

## BAB IV

### PERNIKAHAN ANAK-ANAK MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA

#### A. DEFINISI PERNIKAHAN ANAK-ANAK DALAM ISLAM

Pernikahan anak-anak atau lebih dikenal dengan pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan tersebut masih berusia di bawah umur.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum atau mendahului waktunya. Inilah makna yang terkandung di dalam kata mubakkir dalam Lisanul Arab, Ibnu Jinni mengatakan bahwa makna kata dasar *ba ka ra* adalah lebih dulu di waktu kapan saja baik siang maupun malam. Kata *bakarra* dapat memiliki makna melakukan sesuatu di awal waktu bukan sebelum waktunya, sebagaimana orang mengatakan "kita shalat Subuh di awal waktu".

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan Barat. Mengikut undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baligh. Terdapat dua cara untuk menentukan anak-anak itu sudah baligh atau sebaliknya, yaitu baligh secara *tabi'i* (alami), dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara *tabi'i* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami mensturasi atau haid, dan bagi anak-anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur pula ditentukan apabila

tanda-tanda fisikalnya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut<sup>1</sup>. Oleh karena itu, para fuqaha' meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mengikuti Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun. Manakala Mazhab Maliki pula mengbataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baligh. Pendapat ini berdasarkan Hadis Nabi SAW bahawa Asma' bin Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dengan berpakaian yang nipis, lalu baginda berpaling daripada melihatnya dan bersabda: "Wahai Asma'! Apabila seseorang perempuan mencapai umur haid (baligh), maka tidak boleh dilihatnya padanya kecuali inidan ini" - sambil baginda tunjukkan pada muka dan dua tapak tangannya. (HR. Abu Dawud)

Menurut Yusuf Fatawi dalam Majalah Bulanan Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan yang berjudul *Bilakah Saatnya Untuk Menikah*, yang mana pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh<sup>2</sup>.

Menurutnya juga, istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat

---

<sup>1</sup> Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam" Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (3013) hlm.165-170.

<sup>2</sup> Yusuf fatawi, "Bilakah saatnya untuk menikah", *perkawinan dan keluarga*, Januari 2009, hlm 4

kini, hal itu merupakan suatu keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, “terlalu dini” istilahnya.<sup>3</sup>

Menurut Cholil Nafis dalam bukunya *Fikih keluarga*, yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haid*) bagi wanita.<sup>4</sup>

### **Usia Baligh**

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Syafi’i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.

Adapun Imamiyah, maka mazhab ini menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan Sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini:

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 8-9

<sup>4</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009), hlm 40

إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها

*Artinya: apabila anak perempuan telah mencapai usia Sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.*

Sementara itu, pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bisa terjadi pada anak gadis usia Sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk hamil dipandang sepenuhnya sama dengan hamil itu sendiri.<sup>5</sup>

Pernikahan di bawah umur masih menjadi polemic dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan ada asumsi bahwa hal tersebut dibolehkan oleh agama, didorong serta dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. atau setidaknya Islam tidak mengatur batasan minimal usia perkawinan.

Yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstulasi (*baligh*) bagi wanita.

Syariat Islam secara eksplisit tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, dan paham akan arti sebuah pernikahan.

Oleh karena itu, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut. Tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2008), hlm. 317-318

kebiasaan masyarakat setempat yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Ada orang menikahi gadis berusia 12 tahun dengan alasan salah satunya karena mencontoh Rasulullah yang menikahi Aisyah ketika ia berusia 7 atau 9 tahun.

Untuk menjawab persoalan ini, kita harus melihat tinjauan kemaslahatan dalam perkawinan untuk kedua belah pihak.

Dari aspek kemaslahatan, maka pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologis, berpotensi merusak masa depan pasangan tersebut. Terlebih jika pihak mempelai perempuan tidak tahu apa-apa, ia hanya sekedar mengikuti kemauan walinya.

Yang jelas bahwa Islam dengan Syariatnya menghendaki kemaslahatan menyeluruh (*maslahah ammah*) tercipta dalam kehidupan manusia. Karena itu tentu saja semua hal yang berpotensi merusak kemaslahatan hukumnya harus dihilangkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. berikut:

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW. menghukumi dengan ketentuan “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).*

Kemudian ulama juga merumuskan kaidah fighiyyah yang berorientasi kepada kemaslahatan sebagai berikut:

الضرر يزال

*Artinya: kemudaratan harus dihilangkan.*

Artinya: membuang kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik manfaat.<sup>6</sup>

## B. HUKUM PERNIKAHAN ANAK-ANAK MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Pernikahan anak-anak atau pernikahan usia dini, merupakan pernikahan yang berlangsung bagi pasangan yang belum usia baligh. Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan yang sekufu' (sepadan). Meskipun menikahkan anak pada usia belum baligh diperbolehkan, namun demikian tetaplah memperhatikan kesiapannya baik dari aspek kesehatan maupun psikologi. Menikahkan perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan Islam adalah sah. Dalam hal ini, tidak ada *ikhtilaf* di kalangan ulama, demikian penjelasan Ibn Mundzir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qadamah. Dalam penjelasan Ibn Mundzir menyatakan:

*“Semua ahli ilmu yang pandangannya kami hapal, telah sepakat, bahwa seseorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah)”*.

Salah satu argumentasi yang digunakan adalah firman Allah SWT. yang menyatakan:

وَالَّذِي يَتَّبِعُ مَنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلِئِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 40-43

<sup>7</sup> QS. At-Thalaq: 4

*Artinya: perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara-antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah pada siapa yang berhak menikahkannya. Para ulama Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu dibolehkan. Tetapi yang berhak mengawinkannya hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali lainnya, kecuali Mazhab Maliki yang hanya membolehkan ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil belum baligh. Ini karena terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

*“Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya, dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya”.* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuannya yang masih kecil dengan anak laki-laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa. Apabila akadnya dilakukan oleh wali selain ayah dan kakeknya, misalnya oleh saudaranya, paman atau anak

---

<sup>8</sup> Forum Kajian Tokoh Perempuan, *Pernikahan Dini Vs Perlindungan Anak*, hlm. 1

pamannya maka kedua anak tersebut harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinannya setelah keduanya baligh. berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ<sup>9</sup>

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)”.<sup>10</sup>

Iman Syafi’i berkata dalam kitabnya Al-Umm: adapun masalah anak kecil dan perempuan yang masih perawan, boleh bagi bapanya untuk menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak ada pilihan bagi si anak setelah dewasa untuk membatalkan pernikahan. Apabila anak kecil itu terpotong alat kelaminnya atau rusak, lalu si bapak menikahkannya, maka pernikahannya tertolak, karena ia tidak membutuhkan pernikahan. Apabila orang yang tidak waras dinikahkan, maka tidak ada hak bagi bapaknya dan sultan memisahkan antara dia dengan istrinya atas dasar thalak *khulu’* (cerai dari pihak istri). Begitu pula apabila salah satu dari keduanya dinikahkan, kecuali setelah baligh dan nampak tanda-tanda bahwa ia butuh kepada pernikahan. Apabila laki-laki yang tidak waras menceraikan istrinya. Maka thalaknya tidak sah. Demikian juga apabila ia melakukan *ila’* atau *zihar*, maka semuanya dianggap tidak sah, karena hukum diangkat darinya. Demikian pula hukumnya apabila ia menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anaknya, tidak diterapkan kepadanya syariat *mula’annah* (saling

<sup>9</sup> QS. An-Nisa’ : 3

<sup>10</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk (Jakarta : gema insani, 2011) juz 9, hlm. 173.



melaknat), bahkan ia diharuskan untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya<sup>11</sup>.

Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan ‘Aisyah adalah sifat kekhususan nabi.<sup>12</sup>

Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.<sup>13</sup>

### **Dasar hukum para ulama yang membolehkan pernikahan anak-anak**

#### 1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>14</sup>

*Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”.*

Wajah al-dilalahnya, pengertian “ayaamaa” dalam ayat ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Menggunakan sighat umum, mencakup dewasa maupun anak-anak.

#### 2. Hadis Nabi SAW dalam Shahih Muslim Juz II halaman 1039:

<sup>11</sup> Imam Syafi’I, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Terj.Imron Rosadi Dkk (Jakarta : pustaka Azzam, 2004) jilid 3-6, hlm.364-365.

<sup>12</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta : Secretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011)

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> QS. An-Nur: 32

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة (ست سنين) وبني بي وأنا ابنة تسع" (متفق عليه)

*Artinya: dari Aisyah ra ia berkata: "saya dinikahi Nabi SAW pada saat umur enam tahun, dan saya digauli pada usia Sembilan tahun". [Muttafaq Alaih].*

### 3. Hadis Nabi SAW:

عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya: Dari Al-qamah ra ia berkata: ketika saya berjalan bersama Abdillah ra ia berkata: saya pernah bersama Rasulullah SAW lantas beliau bersabda: barang siapa telah memiliki bekal maka hendaknya segera menikah kerana menikah dapat lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaknya ia berpuasa karena puasa baginya merupakan perisai. [HR. Bukhari dan Muslim]*

### 4. Kaidah fikih dalam Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam karya Izzuddin

Abdul al-Salam jilid I halaman 51:

للسائل أحكام المقاصد فالو سيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل فمن وفقه للوقوف على ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضلها

*Artinya: hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama. Barangsiapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.*

## **C. HUKUM PERNIKAHAN ANAK-ANAK MENURUT FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA**

Sebagaimana diketahui bahwa para ulama mazhab bersepakat pernikahan anak-anak tersebut dibolehkan dalam Islam. Berbeda dengan pandangan

Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia yang menyatakan bahwa pernikahan anak-anak ini tidak sesuai dilaksanakan pada masa sekarang ini, ini karena situasi dan kondisi sekarang berbeda dengan kehidupan pada zaman dahulu. Berikut kutipan langsung dari Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia berkenaan dengan pernikahan anak-anak yang berlangsung pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2014<sup>15</sup> :

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Isu Perkahwinan Anak-anak: Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:

1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan hasil penyelidikan yang telah dikemukakan.
2. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Muzakarah mendapati bahawa:
  - i. Isu berkaitan perkahwinan anak-anak bukan satu isu baru di Malaysia dan **ia tidak lagi dilihat sebagai satu amalan yang 'sihat'** pada masa ini. Perkahwinan Baginda Rasulullah s.a.w. dengan Saidatina `Aisyah r.a tidak wajar dijadikan alasan untuk memudahkan perkahwinan anak-anak. Syeikh Abdullah al-Manie, seorang daripada anggota Majlis Ulama Kanan Saudi juga berpandangan bahawa perkahwinan antara Rasulullah s.a.w. dengan Sayidatina Aisyah r.a tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk mewajarkan perkahwinan gadis bawah umur.
  - ii. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang yang membenarkan perkahwinan anak-anak di negara ini, tetapi ia tidak bermakna perkahwinan ini boleh dilakukan dengan mudah tanpa melihat kepada kemaslahatan anak-anak yang ingin dikahwinkan.
  - iii. Kajian mendapati statistik permohonan dan perkahwinan anak-anak di negara ini semakin meningkat dan kesan akibat daripada perkahwinan ini **lebih banyak mendatangkan keburuk** daripada kebaikan terutama dari aspek kesihatan dan psikologi anak-anak terabit.
  - iv. Kebanyakan perkahwinan anak-anak ini berlaku akibat **didorong oleh rasa cinta kepada pasangan yang tidak mampu dikawal** sehingga mendorong berlakunya penzinaan serta kehamilan luar nikah.

---

<sup>15</sup> Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan Kali ke-106, diakses di <https://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/muzakarah?page=1> pada tanggal 30 Januari 2016

- v. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor perkahwinan anak-anak di Malaysia berlaku **bukan kerana masalah tetapi disebabkan keterlanjuran dan keinginan menutup aib atau maruah** keluarga yang tercemar.
  - vi. Keterangan pakar-pakar kesihatan dan psikologi menegaskan **wujudnya masalah kesihatan fizikal dan mental** yang dialami pada pasangan perempuan akibat perkahwinan anak-anak.
3. Berdasarkan dapatan kajian tersebut, Muzakarah menegaskan bahawa para ulama bersetuju bahawa secara syar'i, **perkahwinan anak-anak bukan merupakan perkara yang wajib atau sunat**. Tiada hadis yang menyatakan bahawa perkahwinan anak-anak itu dianjurkan. Perkahwinan pada zaman Rasulullah s.a.w. yang dilakukan oleh para sahabat lebih kepada menjaga kemaslahatan anak-anak. Ia termasuk dalam perkara harus tetapi hukumnya tertakluk kepada ketentuan Maqasid Syariah dan Qaedah Fiqhiyyah iaitu "Menjauhi Kerosakan" (Dar' al-Mafasid) serta "Mengambil Maslahat" (Jalb al-Masalih).
  4. Sehubungan itu, berasaskan nas-nas Syarak dan Qaedah-Qaedah Fiqhiyyah serta keterangan pakar-pakar kesihatan dan psikologi, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa **perkahwinan anak-anak hanya boleh dibenarkan dengan syarat ia dilakukan semata-mata untuk memenuhi kemaslahatan** anak-anak tersebut secara syar'ie.
  5. Muzakarah juga bersetuju memutuskan supaya pihak-pihak berkuasa berkaitan **memperketatkan syarat-syarat perkahwinan anak-anak** dan memastikan pelaksanaannya dijalankan mengikut prosedur.

### Keterangan/Hujah:

1. Isu perkahwinan anak-anak atau perkahwinan bawah umur mula mendapat tempat di media massa ekoran beberapa kes penderaan serta rogol yang melibatkan pasangan yang berkahwin di bawah umur. Ia turut dikaitkan dengan peningkatan kes ketelanjuran akibat zina dalam kalangan remaja hingga mengheret ramai ibu bapa mengambil keputusan mengahwinkan anak-anak mereka di usia belasan tahun. Walaupun ibu bapa mempunyai alasan tersendiri ketika memberi keizinan untuk anak mereka dinikahkan, akan tetapi ia tetap mengundang pelbagai persepsi daripada masyarakat sama ada menyokong mahupun sebaliknya.
2. Bagi pihak yang menyokong pernikahan anak-anak yang dilaksanakan mengikut lunas-lunas undang-undang, langkah ini dianggap sebagai satu kaedah bagi menyelesaikan masalah sosial, seksual dan perzinaan yang berleluasa.
3. Pihak yang menolak pula berpandangan pernikahan anak-anak dianggap melanggar dan merampas hak asasi anak-anak remaja yang sepatutnya

diberi ruang dan peluang untuk menuntut ilmu serta meningkatkan kemahiran diri.

4. Isu berkaitan perkahwinan anak-anak bukan satu isu baru di Malaysia. Walaupun fenomena ini biasa dilihat dan diamalkan dalam era tahun 50an dan 60an, tetapi ia tidak lagi dilihat sebagai satu amalan yang 'sihat' pada masa ini.
5. Perkahwinan Baginda Rasulullah SAW dengan Sayidatina Aisyah r.a. tidak wajar dijadikan alasan untuk memudahkan perkahwinan anak-anak. Syeikh Abdullah al-Manie, seorang daripada anggota Majlis Ulama Kanan Saudi juga berpandangan bahawa perkahwinan antara Rasulullah SAW dengan Sayidatina Aisyah r.a. tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk mewajarkan perkahwinan gadis bawah umur. Pandangan beliau ini timbul sebagai reaksi kepada perkahwinan seorang gadis berumur 12 tahun dengan seorang lelaki berumur 80 tahun di Buraidah, Arab Saudi.
6. Perkahwinan anak-anak membabitkan remaja perempuan bawah 16 tahun menjurus kepada pertembungan antara undang-undang syariah dengan pandangan bersandarkan kepentingan semua pihak terutamanya remaja berkenaan. Beberapa kes yang melibatkan perkahwinan anak-anak telah diketengahkan oleh media dan mendapat pandangan serta bantahan daripada banyak pihak termasuk kementerian, agensi kerajaan dan swasta serta Badan Bukan Kerajaan (NGOs). Antaranya kes Siti Nur Zubaidah Hussin (11 tahun) yang dipaksa berkahwin dengan lelaki berusia 41 tahun di Kelantan pada Februari 2010.
7. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang yang membenarkan perkahwinan anak-anak tetapi ia tidak bermakna perkahwinan ini boleh dilakukan dengan mudah tanpa melihat kepada kemaslahatan anak-anak yang ingin dikahwinkan. Adalah tidak dinafikan bahawa hukum syarak dan undang-undang syariah membenarkan perkahwinan anak-anak bawah umur 16 tahun tetapi kebenaran ini perlu dinilai agar ia sesuai dengan perkembangan serta perubahan kehidupan hari ini.
8. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) melalui *Worlds Health Organisations* (WHO) dan *United Nations Population Fund* (UNPF) melaporkan bahawa perkahwinan anak-anak banyak berlaku di Asia, diikuti Afrika dan Timur Tengah. Penetapan umur bagi perkahwinan anak-anak pula bergantung kepada ketetapan mengikut Negara. Faktor yang menyumbang kepada perkahwinan anak-anak berbeza antara Negara kerana ia bergantung kepada amalan, budaya, kepercayaan mahupun adat sesuatu bangsa.
9. Sehingga 2012, terdapat lebih 16,000 anak-anak perempuan di bawah umur 16 tahun dan lelaki bawah 18 tahun di Malaysia mendirikan rumah

tangga (Malaysiakini). Pernikahan itu banyak memberikan impak negatif terhadap anak-anak atau remaja terbabit. Kajian yang dibuat oleh WHO mendapati, perkahwinan anak-anak banyak memberi kesan negatif kepada kesihatan fizikal dan mental, serta psikologi anak-anak tersebut.

10. Para ulama bersetuju bahawa secara syarie, perkahwinan anak-anak bukan perkara yang wajib dan tidak juga sunat. Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Sayidatina Aisyah r.a. adalah amalan yang tidak diwajibkan dan tidak juga digalakkan untuk diikuti.
11. Tiada hadis yang menyatakan perkahwinan anak-anak itu dianjurkan. Perkahwinan pada zaman Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat lebih kepada menjaga kemaslahatan anak-anak dan bukan merupakan *mandub* tetapi mubah. Ia termasuk dalam perkara harus (mubah) yang hukumnya tertakluk kepada ketentuan maqasid syariah dan kaedah menjauhi kerosakan (*dar al-mafasid*) dan mengambil maslahat (*jalb al-masalih*) yang meletakkan maslahat sebagai asas pertimbangan.
12. Kaedah syarak dan hadis Rasulullah SAW, لا ضرر ولا ضرر (tidak boleh mendatangkan kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh mendatangkan kemudharatan kepada orang lain) dan kaedah *al-darar yuzalu* (perkara yang berbahaya wajib dihilangkan) bersesuaian dengan hasil atau pendapat pakar-pakar kesihatan dan psikologi yang mendukung adanya masalah kesihatan fizikal dan mental yang dialami oleh pasangan perempuan akibat perkahwinan anak-anak.
13. Pakar perubatan mengesahkan perkahwinan anak-anak mengundang risiko yang tinggi kepada anak-anak tersebut iaitu berisiko kurang darah ketika melahirkan, darah tinggi, sukar melahirkan, kelahiran secara pembedahan, kecederaan rahim, bayi kurang berat badan, IQ rendah dan masalah jantung. Ia juga boleh mengakibatkan kemurungan, sakit jiwa dan hysteria.
14. Para ulama khususnya ulama bermazhab al-Syafie telah meletakkan beberapa syarat yang perlu diikuti sebelum perkahwinan anak-anak dapat dibenarkan. Imam al-Syafie menjelaskan, “*Bapa dibenarkan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dara jika pernikahan itu mendatangkan manfaat kepada anak perempuan itu atau pernikahan itu tidak menjejaskan kehidupannya. Tetapi bapa tidak dibenarkan menikahkannya jika pernikahan itu menjejaskan kehidupannya atau mendatangkan kemudharatan kepadanya. Begitu juga hukumnya jika bapa mahu menikahkan anak lelaki yang masih belum baligh*”. Ini jelas menunjukkan terdapat amalan menghadkan perkara yang harus (*taqyid al-mubah*) oleh ulama-ulama terdahulu sebagai usaha pencegahan terhadap perkara-perkara negatif daripada perkahwinan anak-anak. Dapatan kajian ini menunjukkan, berdasarkan data yang dikemukakan oleh pakar

perubatan, anak-anak perempuan yang berkahwin, kemudian mengandung, terdapat banyak kemudaratan daripada aspek kesihatan kepada mereka.

15. Terdapat beberapa pendapat ulama semasa yang melarang perkahwinan anak-anak dan menetapkan umur tertentu seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan nikah setelah berumur 16 tahun untuk anak-anak perempuan dan 18 tahun untuk lelaki. Begitu juga ulama Saudi; Ibn Uthaimin yang berpendapat tidak setuju dengan perkahwinan anak-anak sekarang ini dan baginya tindakan melarangnya adalah lebih baik. Dalam keadaan sekarang, kedua-dua ulama ini berpendapat hadis Aisyah r.a. tidak sesuai dijadikan hujah hukum bagi membenarkan perkahwinan anak-anak.
16. Berdasarkan keadaan dan konteks masyarakat Malaysia dewasa ini yang ternyata masih ramai yang kurang berpengetahuan berkaitan hukum hakam agama khususnya dalam bab nikah anak-anak, perkahwinan tersebut tidak boleh dibenarkan kecuali dengan syarat-syarat tambahan yang lebih relevan terutama daripada segi kesihatan, mental dan kejiwaan.
17. Masalah yang wajib diperhalusi sebelum perkahwinan anak-anak diluluskan oleh pihak Mahkamah ialah:
  - a) Wali yang memohon untuk anak-anak; lelaki atau perempuan, adalah wali yang memenuhi syarat *'adalah*. Tidak memadai hakim sekadar menilai sifat *'adalah* wali dengan meminta wali beristighfar sahaja;
  - b) Perkahwinan itu tidak menjejaskan kepentingan hidup dan masa depan anak-anak tersebut seperti pendidikan, psikologi, kesihatan dan kewangan;
  - c) Pasangan anak-anak yang dikahwinkan itu mestilah sekufu<sup>16</sup>.

Dari penjelasan dan hujah Muzakarah Fatwa kebangsaan Malaysia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penikahan anak-anak ini tidak sesuai dilaksanakan pada masa sekarang, karena melihat dari beberapa aspek penting yang harus diambil perhatian. Di antaranya kondisi anak-anak tersebut baik dari segi mental, fisik maupun kesehatannya. Selain itu yang perlu digaris bawahi disini adalah berkenaan dengan keadaan masyarakat Islam terutamanya di Malaysia yang masih kurang mendalami hukum-hukum Islam khususnya masalah

---

<sup>16</sup> *ibid*,

pernikahan anak-anak. Oleh karena itu, Muzakarah Fatwa kebangsaan Malaysia membatasi pernikahan anak-anak dengan ketentuan-ketentuan yang cukup ketat, supaya tidak sewenang-wenangnya digunakan dalam masyarakat khususnya di Malaysia.

#### **D. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MUZAKARAH FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA TERHADAP PERNIKAHAN ANAK-ANAK**

##### **1. Persamaan Dan Perbedaan Kedua Pendapat**

Setelah menganalisa secara mendalam, dapat penulis utarakan di sini bahwa antara pendapat Mazhab Syafi'i dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua pendapat tersebut dapat dilihat dari segi hukum kebolehan pernikahan anak-anak yang mana kedua pendapat mebolehkan pernikahan anak-anak dengan memperhatikan semua aspek terutamanya dari sudut kemaslahatan yang diperoleh oleh anak-anak tersebut. Selain itu kedua pendapat tersebut sama-sama menggunakan dalil yang bersumber dari nash-nash baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, namun kedua pendapat tersebut berbeda dalam memahami nash-nash itu melihat situasi dan kondisi zaman yang berbeda.

Sedangkan perbedaan kedua pendapat tersebut dapat ditinjau dari beberapa sudut, seperti berikut :

- i. Dalam konteks ini, Mazhab Syafi'i memang membolehkan pernikahan anak-anak berdasarkan dalil-dalil yang kukuh, serta hujjah-hujjah yang relevan. Mazhab Syafi'i membolehkan pernikahan anak-anak dengan



persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari persyaratan dan ketentuan yang diletakkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia. Ini dikarenakan keadaan zaman dahulu berbeda dengan keadaan pada masa sekarang. Oleh karena itu, Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia lebih cenderung kepada pelarangan pernikahan anak-anak di masa sekarang ini atas alasan sebagaimana disebutkan di atas.

- ii. Penetapan hukum dibolehkannya pernikahan anak-anak menurut Mazhab Syafi'i lebih berpatokan pada kemaslahatan. Jika pernikahan tersebut mendatangkan kemaslahatan khususnya bagi perempuan dan tidak mengabaikan kehidupannya maka pernikahan tersebut dibolehkan. Namun sebaliknya jika tidak ada kemaslahatan bahkan dapat merusak kehidupan anak-anak tersebut, maka lebih baik dihindarkan.
- iii. Sedangkan menurut Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia, lebih memperhatikan keadaan yang mungkin berlaku, baik dari segi mental, kesehatan dan fisik anak-anak tersebut. Menurut pakar kesehatan telah mengesahkan bahwa pernikahan anak-anak mengundang resiko yang besar terhadap anak-anak yaitu beresiko kurang darah ketika melahirkan, darah tinggi, sukar melahirkan, kelahiran secara pembedahan, kecederaan rahim, bayi kurang berat badan, IQ rendah dan masalah jantung. Ia juga boleh mengakibatkan kemurungan, sakit jiwa dan hysteria.

## 2. Analisa Penulis

Apabila kawin muda di masa dahulu itu penting dan tidak membahayakan, akan tetapi jika dilaksanakan pada zaman sekarang, maka kemungkinan besar akan menimbulkan akibat buruk, baik dari segi fisik, mental maupun keadaan ekonomi. Ini dikarenakan kehidupan di zaman dahulu amat berbeda dengan zaman sekarang, yang mana anak-anak di zaman dahulu walaupun masih berusia di bawah umur, tetapi kematangan dan kesanggupan untuk menata rumah tangga telah ada. Hal ini amat bergantung kepada orang tua anak-anak tersebut. Karena orang tua pada zaman dahulu lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga dan amat memperhatikan anak-anak mereka. Sedangkan di zaman sekarang, orang tua lebih banyak yang fokus terhadap pekerjaan mereka, bahkan ada sebagian orang tua yang hampir tidak mempunyai waktu untuk keluarga karena terlalu sibuk. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka agak lambat untuk mencapai kematangan terutamanya untuk hidup mandiri.

Menurut Agus Salim<sup>17</sup>, kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka.

Di Malaysia, Indonesia dan negara-negara di Asia, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Ini dikarenakan pengaruh lingkungan atau didikan orang tua sejak kecil yang ditanamkan kepada anak-anak mereka hingga

---

<sup>17</sup> Agus Salim, *Risalah nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1989), hlm. 47-49

mendekati masa dewasa. Kebiasaan yang masih sering berlaku seperti itu memang baik-baik saja. Namun di samping ada kebaikannya juga ada madharatnya. Rasulullah pun menganjurkan umatnya, terutama bagi para pemuda untuk segera kawin apabila segala sesuatunya sudah memungkinkan. Sebagaimana dalam sabdanya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم  
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*Artinya: 'Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu.*

Menurut para psikologi, perkawinan di bawah umur akan menemui kegagalan karena sangat tergantung pada keadaan jiwa seseorang. Hal itu juga dikuatkan oleh pendapat para dokter, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya calon suami-istri benar-benar berpikir secara matang terutama kesiapan jasmaninya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur mempunyai resiko yang tinggi.

Maka mencegah sesuatu yang belum terjadi, itu lebih baik daripada menghindari sesuatu yang telah terjadi. Akan lebih baik lagi apabila kita bersabar menunggu saat yang tepat untuk melangsungkan perkawinan daripada kawin di bawah umur tetapi belum mampu mengantisipasi segala problem yang bakal menghadangnya.

Menurut penulis, pernikahan anak-anak ini tidak bisa dilaksanakan mutlak pada zaman sekarang, melihat situasi dan kondisi sekarang yang amat

membimbangkan. Dalam arti lain, pernikahan anak-anak ini perlu kepada pengawasan yang ketat dan harus ditetapkan syarat-syarat yang berat. Supaya pernikahan terhadap anak-anak ini tidak dijadikan kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai tujuan lain selain dari tujuan pernikahan. Selain itu, jika pernikahan anak-anak ini tidak dipermudahakan, sebaliknya dipersulit, maka perlindungan terhadap anak-anak semakin terpelihara serta tidak mengabaikan dunia anak-anak mereka. Mereka dapat menikmati masa anak-anak dengan penuh kebebasan tanpa harus memikirkan sesuatu diluar jangkauan pemikiran mereka.